

3002

1996
-1

KANTOR STATISTIK
SUMATERA BARAT



PERPUSTAKAAN
KANTOR STATISTIK PROPINSI SUMBAR

KS : 13540.9720

Ringkasan Eksekutif
Executive Summary

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional
(SUSENAS) 1996

Results of the 1996 National Socio Economic Survey

Propinsi Sumatera Barat
West Sumatra



Pola Konsumsi dan Pengeluaran
Consumption and Expenditure Pattern

Distribusi Pendapatan
Income Distribution

Perkiraan Jumlah Penduduk Miskin
Estimation of Poverty Incidence

BPS

KANTOR STATISTIK PROPINSI SUMATERA BARAT

Ringkasan Eksekutif
Executive Summary

Hasil Survei Sosial Ekonomi
Nasional (SUSENAS) 1996
***Results of the 1996 National Socio
Economic Survey***

Propinsi Sumatera Barat
West Sumatra

KATA PENGANTAR

Kebutuhan akan data sosial ekonomi semakin hari semakin meningkat, mengingat kegunaannya yang semakin luas. Selain sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, data sosial ekonomi juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional diharapkan kebutuhan data tersebut dapat terpenuhi. Salah satu sasaran (modul) Survei Sosial Ekonomi Nasional adalah Konsumsi/Pengeluaran Rumah tangga yang dilaksanakan pada tahun 1996 sebagaimana juga telah dilaksanakan pada tahun 1993 dan 1990.

Publikasi ini menyajikan gambaran ringkas keadaan sosial ekonomi yang secara garis besar meliputi **Pola Konsumsi/Pengeluaran, Distribusi Pendapatan dan Perkiraan Jumlah Penduduk Miskin**. Penerbitan publikasi ini merupakan pendahulu dari publikasi yang lebih lengkap yaitu tabel-tabel mengenai Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Sumatera Barat tahun 1996

Penyebarluasan publikasi ini diharapkan dapat memenuhi berbagai tingkat kebutuhan pemakai data terutama bagi para penentu kebijaksanaan. Dari para pengguna data saran dan masukan sangat kami harapkan untuk perbaikan penerbitan berikutnya. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga terwujudnya publikasi ini kami sampaikan terima kasih dengan harapan publikasi ini bermanfaat.

Padang, April 1997

**Kantor Statistik Propinsi
Sumatera Barat,
Kepala,**



Drs. Armuni Umar
Nip. 340003737

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
II. POLA KONSUMSI/PENGELUARAN	2
1. Pengeluaran Rata-rata Perkapita sebulan.....	2
2. Persentase Pengeluaran Rata-rata Perkapita sebulan.....	2
3. Perkembangan Pengeluaran Rata-rata Perkapita sebulan.....	3
4. Konsumsi Kalori dan Protein.....	4
III. DISTRIBUSI PENDAPATAN.....	6
1. Indeks Gini.....	6
2. Distribusi Menurut Kriteria Bank Dunia.....	6
IV. PERKIRAAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN.....	7
1. Indikator Kemiskinan dan Pembangunan.....	7
2. Konsep Kemiskinan dan Penetapan Garis Kemiskinan.....	8
3. Jumlah Penduduk Miskin.....	9
V. PENUTUP.....	12
LAMPIRAN.....	13
Tabel :	
1. Pengeluaran Rata-rata Perkapita sebulan menurut Jenis Pengeluaran dan Golongan Pengeluaran sebulan tahun 1996.....	14
2. Pengeluaran Rata-rata Perkapita sebulan menurut Jenis Pengeluaran tahun 1990, 1993 dan 1996.....	15
3. Perkembangan Jumlah dan Persentase Jumlah Penduduk Miskin.....	16
4. IHK Bulan Pebruari dan Persentase perubahannya tahun 1993-1996	17

I. Pendahuluan

Kebutuhan data sosial khususnya mengenai kesejahteraan rakyat perlu dipenuhi untuk mengetahui apakah hasil-hasil pembangunan dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat, terutama yang menyangkut berbagai aspek pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan, kesempatan kerja dan lain-lain.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan BPS merupakan survei yang mempunyai cakupan data sosial yang paling luas dan memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan data sosial tersebut diatas.

Susenas 1996 dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia, untuk Propinsi Sumatera Barat dialokasikan ukuran sampel sebanyak 8.032 rumahtangga Kor dan 1.792 rumahtangga.

Modul yang tersebar di seluruh kabupaten/kotamadya baik di daerah perkotaan

maupun pedesaan. Pencacahan lapangan Susenas 1996 dilaksanakan pada bulan Januari/Pebruari 1996, yang mempunyai cakupan pertanyaan modul sama dengan Susenas 1993 yaitu modul konsumsi/pengeluaran dan pendapatan rumahtangga.

Data modul yang dikumpulkan dalam Susenas 1996 mencakup modul konsumsi/pengeluaran dan pendapatan rumahtangga

Uraian berikut ini menyajikan ringkasan hasil pengolahan kuesioner modul konsumsi/pengeluaran rumahtangga dan merupakan angka sementara. Dipilih beberapa indikator yang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat Sumatera Barat. Hasil Susenas 1996 dirangkai dengan hasil Susenas terdahulu sehingga dapat menunjukkan tren pola pengeluaran, distribusi pendapatan dan proporsi penduduk miskin Sumatera Barat dari tahun 1990 sampai 1996.

II. Pola Konsumsi/Pengeluaran

1. Pengeluaran Rata-rata Perkapita

Sebulan

Salah satu dampak keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi adalah semakin meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tercermin dari meningkatnya nilai konsumsi yang dibelanjakan baik untuk makanan maupun bukan makanan.

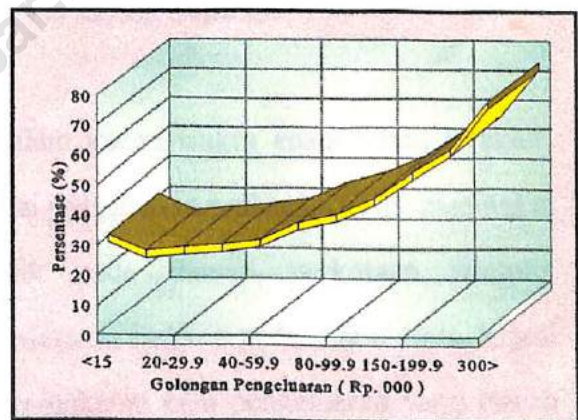
Peningkatan nilai konsumsi merupakan indikator kesejahteraan mengingat semakin besarnya pengeluaran biasanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sekunder (bukan makanan) yang biasanya merupakan pemenuhan kebutuhan/fasilitas penunjang kesejahteraan.

Proporsi konsumsi bukan makanan meningkat seiring dengan peningkatan golongan pengeluaran penduduk.

Seperti terlihat pada lampiran tabel-1, pengeluaran untuk non makanan proporsinya semakin meningkat seiring dengan

meningkatnya golongan pengeluaran perkapita. Untuk golongan pengeluaran perkapita diatas Rp. 150.000 proporsi pengeluaran untuk non makanan telah lebih besar dari konsumsi untuk makanan. Bahkan pada golongan pengeluaran diatas Rp. 300.000,- konsumsi untuk non makanan mencapai tiga kali lipat.

Gambar 1:
Proporsi pengeluaran non makanan menurut golongan pengeluaran.



Diferensia yang tampak antara daerah perkotaan dan pedesaan adalah perbedaan nilai terkecil pengeluaran. Pada daerah perkotaan, penduduk dengan golongan pengeluaran perkapita kurang dari Rp.15.000 sudah tidak ada lagi.

2. Persentase Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan.

Sebagaimana umumnya pada negara- negara berkembang, proporsi pengeluaran rumahtangga untuk makanan masih cukup besar, mencapai lebih dari separoh total pengeluaran. Keadaan sebaliknya terjadi pada negara-negara yang telah maju.

Pada tahun 1996 proporsi pengeluaran untuk makanan penduduk Sumatera Barat masih sebesar 62,12 persen, sedikit lebih tinggi dari angka nasional yang mencapai 55,27 persen.

Tabel 2.1.

Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Tahun 1990-1996

Wilayah	Makanan			Bukan Makanan		
	1990	1993	1996	1990	1993	1996
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumbar	64,48	60,88	62,12	35,52	39,12	37,88
Indonesia	60,36	56,86	55,27	39,64	43,14	44,73

Dibandingkan dengan hasil survei yang sama sebelumnya (Susenas 1993) menunjukkan adanya peningkatan persentase pengeluaran untuk makanan di Sumatera Barat sebesar 1,24 persen.

Sebaliknya, untuk pengeluaran bukan makanan menurun dari 39,12 persen pada tahun 1993 menjadi 37,88 persen pada tahun 1996.

Terjadinya peningkatan proporsi pengeluaran untuk makanan diduga berkaitan erat dengan inflasi yang lebih banyak berpengaruh langsung pada bahan-bahan makanan dibanding barang-barang non makanan.

3. Perkembangan Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, nilai pengeluaran perkapita terus meningkat baik pada daerah perkotaan maupun pedesaan. Bahkan pada tahun 1996 terjadi peningkatan nilai pengeluaran yang cukup besar dari tahun 1993 baik untuk makanan maupun bukan makanan.

Untuk pengeluaran makanan meningkat sampai 74,27 persen dari Rp. 26.747,- pada tahun 1993 menjadi Rp. 46.613,- perkapita perbulan. Sedangkan pengeluaran bukan makanan meningkat 65,38 persen dari Rp. 17.188,- menjadi Rp.28.426,-.

Tabel 2.2.
Perkembangan Rata-rata pengeluaran
Perkapita sebulan tahun 1990-1996

Wilayah	Makanan			Bukan Makanan		
	1990	1993	1996	1990	1993	1996
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KOTA						
Nilai	26.807	34.922	55.039	21.088	32.939	44.918
Perkem- bangan	-	30,27	57,61	-	56,20	36,37
DESA						
Nilai	18.826	24.393	43.777	8.828	12.653	22.875
Perkem- bangan	-	29,57	79,47	-	43,33	80,79
K + D						
Nilai	20.389	26.747	46.613	11.234	17.188	28.426
Perkem- bangan	-	31,18	74,27	-	53,00	65,38

Yang menarik adalah bahwa peningkatan yang sangat besar justru terjadi di daerah pedesaan. Di pedesaan, nilai pengeluaran untuk makanan meningkat 79,47 persen dari Rp.24.393 pada tahun 1993 menjadi Rp.43.777,-. Sedang di daerah perkotaan hanya meningkat 57,61 persen dari Rp.34.922,- menjadi Rp.55.039,-.

Keadaan yang sama juga terjadi pada pengeluaran bukan makanan. Pada tahun 1993 pengeluaran untuk bukan makanan-

daerah pedesaan masih sebesar Rp.12.653, dan pada tahun 1996 telah meningkat mencapai Rp.22.875,- yang berarti meningkat 80,79 persen. Sementara itu daerah perkotaan hanya meningkat 36,37 persen dari Rp. 32.939 pada tahun 1993 menjadi Rp. 44.918 tahun 1996.

Peningkatan nilai pengeluaran yang sangat besar terjadi pada daerah pedesaan baik untuk makanan maupun bukan makanan masing-masing mencapai 79,47% dan 80,79%

Hal ini dapat mengindikasikan daya beli masyarakat pedesaan semakin meningkat yang tentunya berkaitan dengan peningkatan taraf ekonomi masyarakat pada umumnya.

4. Konsumsi Kalori Dan Protein

Salah satu Indikator untuk menentukan tingkat Kesejahteraan penduduk adalah tingkat kecukupan gizi yang biasanya disajikan dalam unit Kalori dan Protein.

Konsumsi Kalori dan Protein dihitung dengan mengalikan kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap jenis makanan.

Pakar Gizi memberikan patokan/pedoman yang berbeda tentang standar kecukupan konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia. Dari hasil Widya Karya Pangan dan Gizi Nasional tahun 1993 tingkat kecukupan konsumsi kalori dan protein perkapita perhari masing-masing 2 150 kkal dan 46,20 gram.

Konsumsi Kalori and Protein penduduk Sumatera Barat telah melewati batas standar kecukupan masing - masing 2 250,97 kkal dan 58, 41 gram perkapita perhari

Secara rata-rata konsumsi kalori dan protein perkapita perhari penduduk Sumatera Barat berada diatas batas standar kecukupan baik untuk daerah perkotaan maupun pedesaan. Yang lebih menarik adalah tingkat rata-rata konsumsi kalori dan protein di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan

daerah perkotaan. Di daerah pedesaan rata-rata konsumsi kalori mencapai 2 307,81 gram perkapita perhari dan di pedesaan hanya 2 087,05 gram perkapita perhari, untuk protein di daerah pedesaan rata-rata konsumsi perhari perkapitanya adalah 59,10 gram dan di daerah pedesaan adalah 56,35 gram. Salah satu sebab tingginya konsumsi kalori dan protein didaerah pedesaan diduga karena perbedaan harga barang makanan, ini terlihat pada kelompok golongan pengeluaran penduduk terendah yaitu kecil dari Rp.15 000 dan Rp.15 000 - Rp.19 999. penduduk di pedesaan masih bisa mengkonsumsi kalori dan protein sedangkan pada daerah perkotaan pada kelompok pengeluaran yang sama, penduduknya tidak mampu lagi memenuhi konsumsi kalori dan protein.

Tabel 2.3
Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Protein Perkapita Perhari (dalam Gram) Sumatera Barat 1996

Kota/ Desa	Kalori	Protein
(1)	(2)	(3)
Kota	2 082,05	56,35
Desa	2 307,81	59,10
Kota + Desa	2 250,97	58,41

III. Distribusi Pendapatan

1. Indeks Gini

Indeks Gini (Gini Ratio) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk melihat ketidakmerataan (ketimpangan) pendapatan penduduk suatu wilayah. Jika Indeks Gini menunjukkan angka kurang dari 0,30 maka pendapatan penduduk dapat dikatakan cukup merata (ketimpangan rendah). Bila bernilai antara 0,30 sampai 0,50 berarti memiliki ketimpangan sedang, dan bila lebih dari 0,50 pendapatan penduduk memiliki ketimpangan tinggi.

Indeks Gini Sumatera Barat 1996 sebesar 0,278 berarti distribusi pendapatan cukup merata

Dari hasil Susenas 1996 didapat Indeks Gini sebesar 0,278 yang berarti distribusi pendapatan penduduk Sumatera Barat tergolong cukup merata atau memiliki ketimpangan rendah.

Tabel 2.4
Persentase Pembagian Pendapatan Perkapita
dan Indeks Gini Sumatera Barat
1990-1996

Tahun	Pembagian Pendapatan			Indeks Gini
	40% Rendah	40% Sedang	20% Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1990	24,37	37,87	37,76	0,269
1993	21,78	37,74	40,49	0,305
1996	23,43	38,08	38,49	0,278

Keadaan ini juga telah lebih baik dibandingkan keadaan tahun 1993 yang indeks ginya mencapai angka 0,305. Meskipun pada tahun 1996 angkanya telah menurun, namun bila dibandingkan keadaan pada tahun 1990, angkanya masih sedikit lebih tinggi.

2. Distribusi Menurut Kriteria Bank Dunia

Selain indeks gini, ketimpangan pemerataan pendapatan penduduk juga dapat dilihat dari Kriteria Bank Dunia. Bank Dunia menggolongkan penduduk menjadi tiga kelompok,

yaitu 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan sedang dan 20% penduduk berpendapatan tinggi.

Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40% penduduk ber-pendapatan rendah. Apabila kelompok ini memperoleh kurang dari 12% dari seluruh pendapatan penduduk, maka ketimpangan dianggap tinggi. Jika memperoleh antara 12% - 17% maka tingkat ketimpangan dianggap sedang, dan bila memperoleh diatas 17% ketimpangan dikatakan rendah.

40 % penduduk berpendapatan rendah menikmati 23,43% dari seluruh pendapatan penduduk

Berdasar kriteria tersebut, berdasarkan hasil Susenas 1996, ketimpangan di Sumatera Barat termasuk dalam kategori ketimpangan rendah, dimana 40% penduduk berpendapatan rendah memperoleh 23,43 persen dari seluruh pendapatan penduduk.

IV. Perkiraan Jumlah Penduduk Miskin

1. Indikator Kemiskinan dan Pembangunan

Pembangunan yang dilaksanakan sejak Pelita I telah menunjukkan dampak nyata, antara lain berupa peningkatan pendapatan perkapita yang pesat. Hasil-hasil pembangunan juga terlihat dari berbagai indikator termasuk indikator kemiskinan yang menurun. Jumlah penduduk miskin Sumatera Barat diperkirakan telah menurun dari 600,2 ribu jiwa pada tahun 1990 menjadi sekitar 384,6 ribu jiwa pada tahun 1996.

Dengan adanya pelaksanaan program IDT selama 3 tahun terakhir, keberadaan indikator kemiskinan dirasakan menjadi semakin penting, tidak saja untuk tingkat nasional, tetapi juga sampai tingkat propinsi dan bahkan kabupaten.

Penduduk miskin di Sumatera Barat makin berkurang dari 600,2 ribu jiwa pada tahun 1990 menjadi 384,6 ribu jiwa pada tahun 1996

2. Konsep Kemiskinan dan Penetapan Garis Kemiskinan

Indikator kemiskinan yang selama ini digunakan secara konsep tidak berubah, namun secara metodologi mengalami penyempurnaan, misalnya dalam metode penetapan paket komoditi makanan dan non makanan yang mendasari penentuan standar kecukupan pangan dan nonpangan.

Konsep kemiskinan tetap mengacu pada pemenuhan kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Menurut konsep tersebut, penduduk miskin adalah mereka yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum makanan setara 2.100 kalori perkapita perhari ditambah dengan kebutuhan minimum bukan makanan yang paling mendasar.

Tabel 3.1.
Pertumbuhan Garis kemiskinan Propinsi Sumatera Barat
Tahun 1993-1996

Garis Kemiskinan	1993		1996		Pertumbuhan Pertahun (%)	
	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Makanan	22.977 (83,51)	17.999 (85,38)	35.517 (82,88)	28.957 (82,96)	15,62	17,18
Bukan Makanan	4.538 (16,49)	3.082 (14,62)	7.338 (17,12)	5.946 (17,04)	17,37	24,49
GarisKemiskinan	27.515 (100,00)	21.081 (100,00)	42.855 (100,0)	34.903 (100,00)	15,92	18,30

(....) share dalam %

Secara umum metode penetapan garis kemiskinan dapat digolongkan kedalam dua kelompok, yaitu metode Harga Implisit Kalori yang digunakan sejak 1976 hingga 1990 dan metode Paket Komodit Dasar (PKKD) yang digunakan sejak 1993 dan disempurnakan berdasar-kan survei PKKD tahun 1995.

Garis kemiskinan tingkat propinsi diperkirakan dari nilai kecukupan makanan dan nilai kecukupan non makanan. Dalam penghitungan tingkat propinsi, paket komoditi makanan yang digunakan adalah paket 1996 yang ditentukan kembali dari data Susenas 1996. Paket komoditi non makanan diperkirakan berdasarkan hasil Survei PKKD masing-masing propinsi.

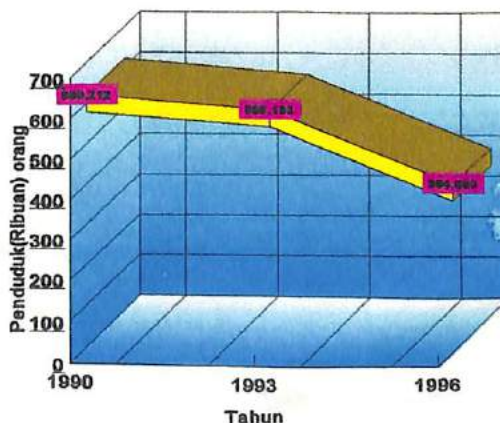
Penghitungan jumlah penduduk miskin 1996 didasarkan pada paket yang disempurnakan tersebut dengan menerapkan pada data hasil Susenas 1996.

3. Jumlah Penduduk Miskin

Pada tabel 3.2. disajikan hasil penghitungan jumlah penduduk miskin Propinsi Sumatera Barat dan Indonesia (perkiraan angka nasional) menurut daerah perkotaan dan pedesaan untuk tahun 1993 dan 1996.

Jumlah penduduk miskin Sumatera Barat tahun 1996 diperkirakan sebanyak 384.583 jiwa atau 8,76% dari jumlah penduduk seluruhnya.

Gambar 2:
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin
Tahun 1993 - 1996



Tabel 3.2.
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Tahun 1993-1996

Daerah	1993			1996			Penurunan Pertahun 93-96 (%)
	Batas Miskin (Rp/kap/bl)	Penduduk Miskin	% Penduduk Miskin	Batas Miskin (Rp/kap/bl)	Penduduk Miskin	% Penduduk Miskin	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SUMATERA BARAT							
Kota	27.515	84.073	8,63	42.445	64.434	5,58	8,48
Desa	21.061	482.060	14,93	34.992	320.148	9,89	12,74
Kota+Desa	-	566.133	13,47	-	384.583	8,76	12,08
INDONESIA							
Kota	27.905	8,7 *)	13,45	38.246	7,2 *)	9,71	6,11
Desa	18.244	17,2 *)	13,79	27.413	15,3 *)	12,30	3,74
Kota+Desa	-	25,9 *)	13,67	-	22,5 *)	11,34	4,58

*) Perkiraan angka nasional (dalam juta jiwa)

Dibandingkan dengan tahun 1993 berarti menunjukkan adanya penurunan 181,5 ribu jiwa selama kurun waktu 1993-1996 atau turun rata-rata 12,08% per tahun.

Menurut angka nasional (Indonesia), persentase jumlah penduduk miskin sekitar 11,34% dengan laju penurunan rata-rata 4,58% pertahun selama kurun waktu 1993-1996

Penurunan jumlah penduduk miskin Sumatera Barat di daerah pedesaan jauh lebih cepat dibandingkan daerah perkotaan. Jumlah penduduk miskin di perkotaan menurun sebanyak 19.639 selama 3 tahun atau turun rata-rata 8,48% pertahun.

Di daerah pedesaan terjadi penurunan sebanyak 161.912 jiwa selama 3 tahun terakhir atau turun rata-rata 12,74% pertahun. Sebaliknya dari perkiraan angka nasional (Indonesia) penurunan di daerah perkotaan jauh lebih cepat dibanding daerah pedesaan.

_____((()))_____

<https://sumbar.bps.go.id>

V. Penutup

Sajian ringkas ini merupakan sebagian kecil dari hasil pengolahan data Susenas 1996 Modul konsumsi/pengeluaran dan pendapatan rumah tangga. Tabel lebih rinci sedang dipersiapkan publikasinya untuk dapat diterbitkan pada tahun 1997/1998.

Pola Pengeluaran

Pengeluaran Penduduk Sumatera Barat untuk non makanan proporsinya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya golongan pengeluaran perkapita. Pada golongan pengeluaran diatas Rp. 300 000,- konsumsi untuk non makanan mencapai tiga kali lipat dari pengeluaran untuk makanan. Proporsi untuk makanan masih 62,12 persen dan untuk non makanan 37,88 persen , angka ini lebih tinggi dari angka nasional yang mencapai masing-masing 55,27 persen dan 44,73 persen. Selama kurun waktu tahun 1990 - 1993 pengeluaran untuk makanan dan non makanan mengalami peningkatan yang cukup besar ,terutama di pedesaan nilai pengeluaran makanan meningkat 79,47

persen dan untuk nonmakanan 80,79 persen, sedangkan di daerah perkotaan masing-masing hanya mengalami peningkatan 57,61 persen dan 36,37 persen.

Distribusi Pendapatan

Indeks Gini Sumatera Barat tahun 1996 sebesar 0,278, berarti distribusi pendapatannya tergolong cukup merata. Berdasarkan Kriteria Bank Dunia ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat untuk tahun 1996 termasuk kategori ketimpangan rendah dimana 40 persen penduduk berpendapatan rendah memperoleh 23,43 persen dari seluruh pendapatan.

Perkiraan Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin Sumatera Barat diperkirakan telah menurun dari 600,2 ribu jiwa tahun 1993 menjadi 384,5 ribu jiwa tahun 1996 . Penurunan jumlah penduduk miskin didaerah pedesaan jauh lebih cepat dibandingkan dengan daerah perkotaan yang masing-masing turun rata-rata 12,74 persen pertahun dan 8,48 persen pertahun.

LAMPIRAN

<https://sumbar.bps.go.id>

Tabel 1.
Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran
Dan Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan Tahun 1996

Jenis Pengeluaran	Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan (Rp)											Rata-rata Per Kapita
	< 15000	15000 s.d 19999	20000 s.d 29999	30000 s.d 39999	40000 s.d 59999	60000 s.d 79999	80000 s.d 99999	100000 s.d 149999	150000 s.d 199999	200000 s.d 299999	300000 keatas	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
PERKOTAAN												
a. Makanan												
- Nilai (Rp)	0	0	20618	24289	33346	44729	55589	67602	77815	98948	125786	55039
- Proporsi (%)	0.00	0.00	74.50	67.97	64.72	63.30	62.92	56.47	45.87	41.14	21.09	55.06
b. Bukan Makanan												
- Nilai (Rp)	0	0	7059	11445	18181	25928	32759	51701	91827	141575	470719	44918
- Proporsi (%)	0.00	0.00	25.50	32.03	35.28	36.70	37.08	43.53	54.13	58.86	78.91	44.94
PEDESAAN												
a. Makanan												
- Nilai (Rp)	9724	15141	20020	26116	36016	46371	56588	72662	89556	113381	109229	43777
- Proporsi (%)	70.78	75.81	74.49	74.04	73.03	67.45	63.27	59.57	52.91	44.59	29.84	65.68
b. Bukan Makanan												
- Nilai (Rp)	4015	4832	6855	9156	13303	22381	32844	49319	79691	140921	256849	22875
- Proporsi (%)	29.22	24.19	25.51	25.96	26.97	32.55	36.73	40.43	47.09	55.41	70.16	34.32
KOTA + DESA												
a. Makanan												
- Nilai (Rp)	9724	15141	20070	25977	35669	45930	56250	69889	83767	101683	115430	46613
- Proporsi (%)	70.78	75.81	74.49	73.57	71.90	66.31	63.16	57.96	49.44	41.82	25.52	62.12
b. Bukan Makanan												
- Nilai (Rp)	4015	4832	6872	9331	13937	23334	32815	50698	85675	141451	336952	28426
- Proporsi (%)	29.22	24.19	25.51	26.43	28.10	33.69	36.84	42.04	50.56	58.18	74.48	37.88

Tabel 2.

Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran 1990, 1993 Dan 1996

Jenis Pengeluaran	1990		1993		1996		Perkembangan		
	Nilai (Rp)	(%)	Nilai (Rp)	(%)	Nilai (Rp)	(%)	90 - 93	93 - 96	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A. MAKANAN									
1. Padi-padian	6531	20.65	7171	16.32	10733	14.30	9.80	49.67	
2. Umbi-umbian	355	1.12	371	0.84	584	0.78	4.51	57.41	
3. I k a n	2239	7.08	2636	6.00	4173	5.56	17.73	58.31	
4. D a g i n g	904	2.86	1198	2.73	2541	3.39	32.52	112.10	
5. Telor Dan Susu	968	3.06	1295	2.95	2259	3.01	33.78	74.44	
6. Sayur -sayuran	1871	5.92	2869	6.53	5517	7.35	53.34	92.30	
7. Kacang-kacangan	346	1.09	412	0.94	666	0.89	19.08	61.65	
8. Buah-buahan	789	2.50	1144	2.60	2670	3.56	44.99	133.39	
9. Minyak dan Lemak	1188	3.76	1465	3.33	2491	3.32	23.32	70.03	
10. Bahan Minuman	935	2.96	1107	2.52	1777	2.37	18.40	60.52	
11. Bumbu-bumbuan	282	0.89	365	0.83	456	0.61	29.43	24.93	
12. Konsumsi lainnya	134	0.42	229	0.52	742	0.99	70.90	224.02	
13. Makanan Jadi	2120	6.70	3786	8.62	7873	10.49	78.58	107.95	
14. Minuman Mengandung Alkohol	6	0.02	19	0.04	23	0.03	216.67	21.05	
15. Tembakau Dan Sirih	1721	5.44	2680	6.10	4108	5.47	55.72	53.28	
Sub Jumlah Makanan	20389	64.48	26747	60.88	46613	62.12	31.18	74.27	
B. BUKAN MAKANAN									
1. Perum. Bhn. Bakar , Penerangan & Air	4359	13.78	6319	14.38	9400	12.53	44.96	48.76	
2. Aneka Barang Dan Jasa	2926	9.25	4425	10.07	8156	10.87	51.23	84.32	
3. Pakaian Alas Kaki	2033	6.43	3297	7.50	5266	7.02	62.17	59.72	
4. Barang Tahan Lama	1019	3.22	1680	3.82	4108	5.47	64.87	144.52	
5. Pajak Dan Asuransi	238	0.75	380	0.86	550	0.73	59.66	44.74	
6. Keperluan Pesta	659	2.08	1087	2.47	945	1.26	64.95	-13.06	
Sub Jumlah Bukan Makanan	11234	35.52	17188	39.12	28425	37.88	53.00	65.38	
Jumlah Seluruh Pengeluaran	31623	100.00	43935	100.00	75038	100.00	38.93	70.79	

Tabel 3.
Perkembangan Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin
Tahun 1993 - 1996

Propinsi	1993		1996		Perkembangan 93 - 96	
	Jumlah Penduduk Miskin	% Pddk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	% Pddk Miskin	Perubahan Jumlah Penduduk Miskin	Perubahan Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. Dista Aceh	496,719	13.46	425,597	10.79	-71,122	-2.67
12. Sumatera Utara	1,331,631	12.31	1,234,194	10.92	-97,437	-1.39
13. Sumatera Barat	566,133	13.47	384,583	8.76	-181,550	-4.71
14. R i a u	410,853	11.20	322,018	7.94	-88,835	-3.26
15. J a m b I	299,380	13.38	222,842	9.06	-76,538	-4.32
16. Sumatera Selatan	1,023,911	14.89	794,870	10.72	-229,041	-4.17
17. Bengkulu	173,112	13.11	137,239	9.87	-35,873	-3.24
18. Lampung	751,817	11.70	724,857	10.65	-26,960	-1.05
31. DKI Jakarta	497,121	5.65	231,331	2.48	-265,790	-3.17
32. Jawa Barat	4,612,352	12.20	3,962,112	9.88	-650,240	-2.32
33. Jawa Tengah	4,618,743	15.78	4,157,299	13.91	-461,444	-1.87
34. DI. Yogyakarta	343,466	11.77	303,769	10.42	-39,697	-1.35
35. Jawa Timur	4,423,709	13.25	4,046,529	11.86	-377,180	-1.39
51. B a l I	270,199	9.46	125,600	4.29	-144,599	-5.17
52. Nusa Tenggara Barat	692,421	19.52	653,026	17.61	-39,395	-1.91
53. Nusa Tenggara Timur	756,439	21.84	748,974	20.57	-7,465	-1.27
54. Timor Timur	292,958	36.24	267,806	31.85	-25,152	-4.39
61. Kalimantan Barat	874,526	25.05	820,490	21.98	-54,036	-3.07
62. Kalimantan Tengah	321,578	20.85	189,415	11.24	-132,163	-9.61
63. Kalimantan Selatan	517,752	18.61	424,279	14.33	-93,473	-4.28
64. Kalimantan Timur	294,922	13.75	224,561	9.24	-70,361	-4.51
71. Sulawesi Utara	304,733	11.79	284,648	10.60	-20,085	-1.19
72. Sulawesi Tengah	193,897	10.48	163,372	8.18	-30,525	-2.30
73. Sulawesi Selatan	659,152	8.97	617,131	8.02	-42,021	-0.95
74. Sulawesi Tenggara	162,279	10.84	139,394	8.48	-22,885	-2.36
81. Maluku	478,855	23.93	417,047	19.47	-61,808	-4.46
82. Irian Jaya	441,851	24.16	427,826	21.17	-14,025	-2.99
Jumlah	25,810,509	13.67	22,450,809	11.32	-3,359,700	-2.35
INDONESIA(dalam juta)	25,9	13,67	22,5	11,34	-3,4	-2,33

111 -

4200

1-3



BADAN P
PROVINS

<https://sumbar.bps.go.id>